

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

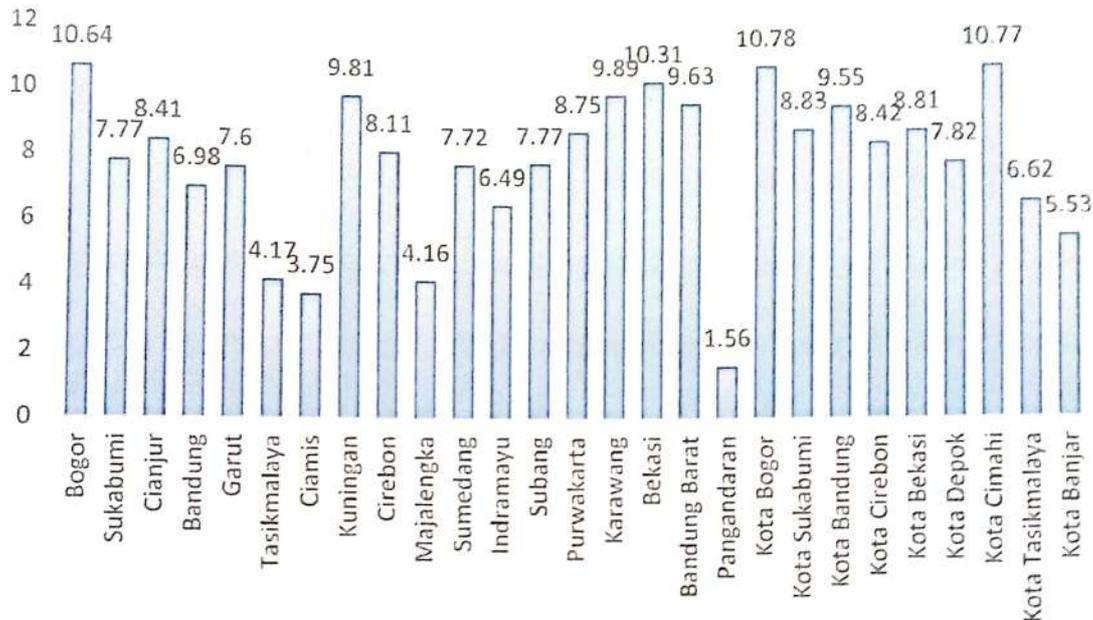
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan warga setempat mengelola sumber daya yang tersedia melalui kerjasama antara pemerintah daerah dan sektor swasta. Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan peluang kerja dan merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. (Rakhmawati & Boedirochminarni, 2018)

Dalam pembangunan perekonomian suatu daerah masalah ketenagakerjaan masih menjadi masalah utama. Hal tersebut karena adanya kesenjangan atau ketimpangan untuk memperolehnya. Awal mula dari permasalahan tersebut adalah karena adanya ketimpangan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja disuatu daerah dan kemajuan berbagai sektor perekonomian dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, dapat dilihat dari adanya kesempatan kerja yang tersedia. Dalam pengelolaannya, pembangunan ekonomi selalu melibatkan sumber daya manusia sebagai pelaku utamanya. Dari segi pengelolaan sumber daya manusia berperan penting untuk mencapai keberhasilan dalam pembangunan ekonomi, oleh sebab itu jumlah penduduk dalam suatu daerah menjadi indikator utama dalam pembangunan.

Ketersediaan lapangan kerja yang terbatas menjadi salah satu masalah yang dihadapi Jawa Barat saat ini. Hal ini menyebabkan banyak penduduk yang sudah memasuki usia kerja belum memiliki pekerjaan yang layak. Kondisi ini turut berkontribusi terhadap peningkatan angka kemiskinan dan rendahnya pendapatan

masyarakat Indonesia (Warapsari et al., 2020). Tidak dapat dipungkiri bahwa realisasi pembangunan ekonomi tidak akan berjalan dengan baik jika tidak diiringi dengan adanya penyerapan tenaga kerja.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat tahun 2022

**Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Jawa Barat Tahun 2017-2022 (Persen)**

Pembangunan ekonomi di wilayah Jawa Barat masih menyisakan masalah klasik yaitu tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Berdasarkan gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka Jawa Barat tercatat sebesar 8,31% dengan Kabupaten/Kota angka tertinggi yaitu sebesar 10,78% yaitu Kota Bogor dan Kota Cimahi 10,77% (Badan Pusat Statistik, 2022). Bandung Raya sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian di Jawa Barat tidak lepas dari tingginya angka pengangguran. Pada tahun 2022 tercatat tingkat pengangguran terbuka di Bandung Raya terbesar ada di Kota Cimahi sebesar 10,77%, Kabupaten Bandung Barat 9,63%, Kota Bandung 9,55%, dan Kabupaten Bandung 6,98%.

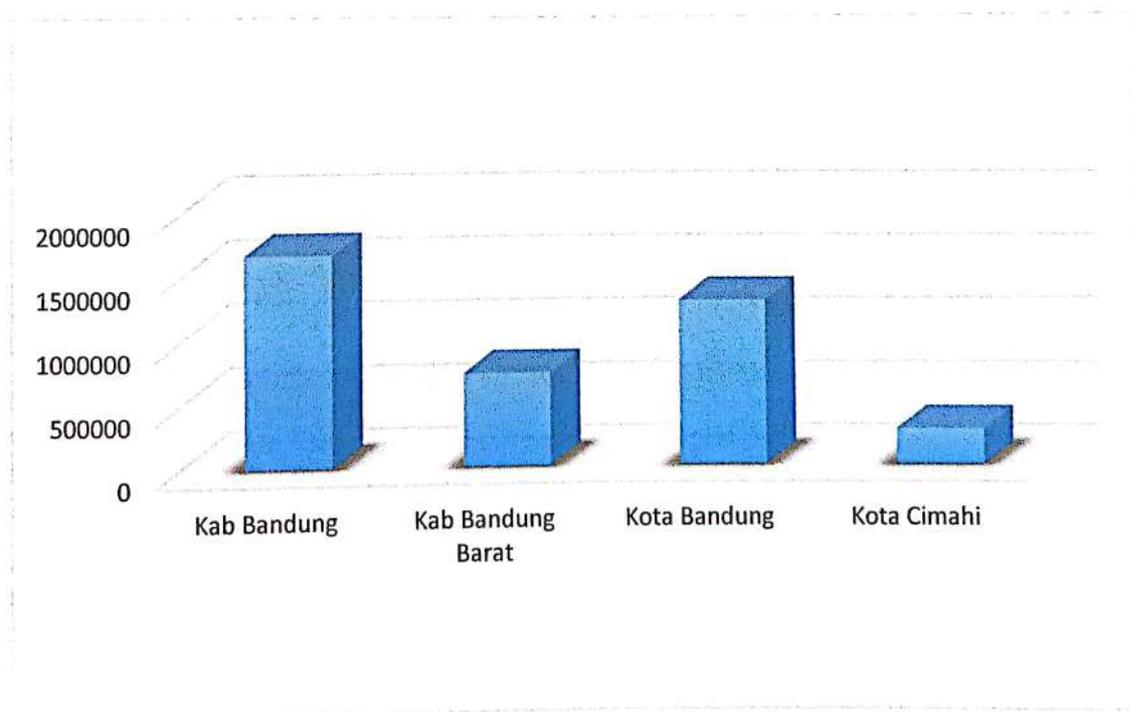
Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan kerja yang sudah terisi oleh banyaknya jumlah penduduk bekerja. Penduduk yang bekerja terserap dan tersebar di berbagai sektor perekonomian. Dalam dunia usaha tidak memungkinkan mempengaruhi kondisi tersebut, maka hanya pemerintah yang dapat menangani dan mempengaruhi faktor eksternal (Sumarsono, 2009).

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menimbulkan berbagai masalah dan hambatan bagi upaya-upaya Pembangunan yang dilakukan di negara berkembang. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan pesatnya pertambahan jumlah angkatan kerja, sedangkan kemampuan negara berkembang dalam menciptakan kesempatan kerja baru sangat terbatas. Tenaga kerja yang berkualitas dapat membantu meningkatkan produktivitas dan daya saing perekonomian suatu negara. Peranan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi akan mempengaruhi pendapatan. Faktor yang penting dari tenaga kerja bukanlah dari segi kuantitas melainkan kualitas. Bila kualitas tenaga kerja lebih baik maka akan terjadi peningkatan produksi. (Arsyad, 2004)

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam berdirinya suatu perusahaan. Kerja sama antar karyawan dalam perusahaan diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Masalah tenaga kerja merupakan masalah yang dihadapi oleh setiap perusahaan, karena industri mengandalkan talenta, keterampilan, dan kreativitas karyawan. Perusahaan yang besar dan modern telah menggunakan mesin atau alat otomatis,

tetapi mesin-mesin tersebut tetap membutuhkan tenaga kerja untuk mengoperasikannya.

Permasalahan ketenagakerjaan tidak pernah lepas pada suatu wilayah, salah satu wilayah yang sering disorot adalah wilayah Metropolitan Bandung Raya di Provinsi Jawa Barat. Metropolitan Bandung Raya adalah kesatuan wilayah perkotaan yang terbentuk karena kegiatan aglomerasi ekonomi, aglomerasi aktivitas sosial Masyarakat, aglomerasi lahan terbangun, dan aglomerasi penduduk mencapai 5,8 juta jiwa terletak di 4 Kabupaten/Kota yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat. (BPS, 2010). Permasalahan penyerapan tenaga kerja pada wilayah Metropolitan Bandung Raya hanya berpusat di Kabupaten Bandung dan Kota Bandung saja. Data penyerapan tenaga kerja dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: (Open Data Jabar, 2022b)

**Gambar 1.2 Jumlah Tenaga Kerja Metropolitan Bandung Raya tahun 2022 (Orang)**

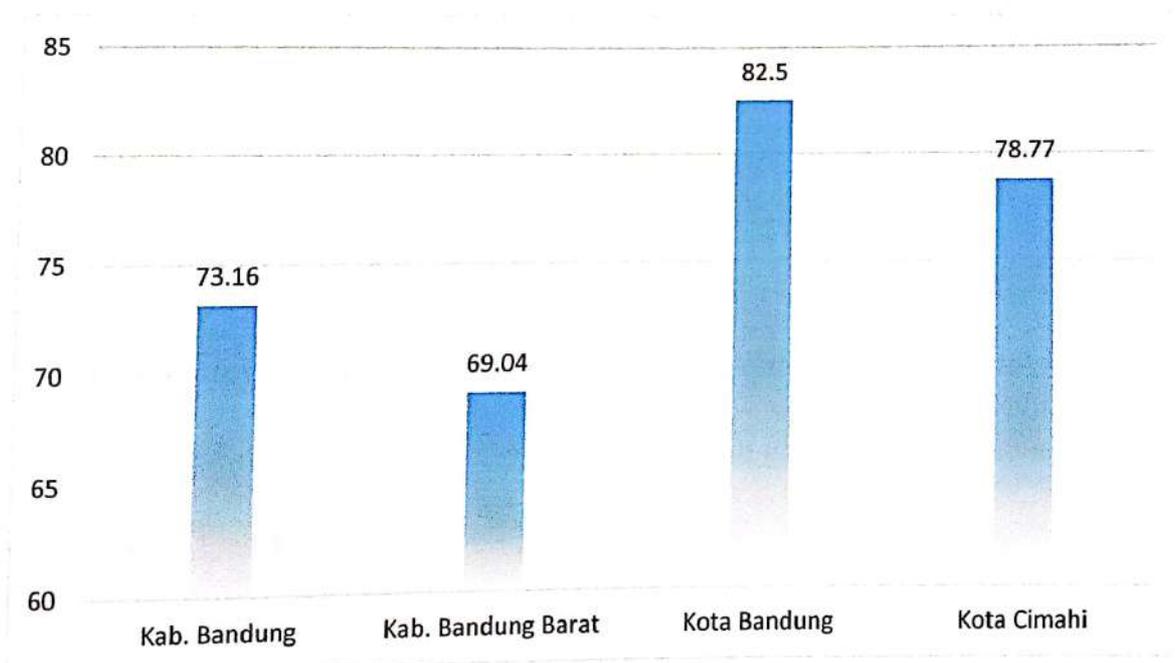
Berdasarkan data dari open data jabar pada gambar 1.2 diatas menunjukkan penyerapan jumlah tenaga kerja di wilayah Bandung Raya yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi pada tahun 2022 cukup bervariasi. Kabupaten Bandung merupakan wilayah dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi di wilayah Bandung Raya dengan nilai mencapai 1.682.510 orang, selanjutnya Kota Bandung juga mempunyai penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi pada tahun 2022 mencapai 1.298.537 orang diikuti dengan Kabupaten Bandung Barat dengan nilai 740.639 orang dan Kota Cimahi dengan angka terendah di wilayah Bandung Raya dengan nilai yaitu mencapai 286.038 orang.

Pertumbuhan populasi yang meningkat membawa dampak pada peningkatan jumlah Angkatan kerja. Jika kesempatan kerja mengikuti jumlah penambahan angkatan kerja, maka Angkatan kerja yang bertambah jumlahnya tersebut akan menjadi bonus demografi jika mereka dapat memiliki pekerjaan, tetapi juga dapat menjadi bencana jika banyak dari mereka tidak memiliki pekerjaan. Situasi ini dimana Angkatan kerja tumbuh lebih cepat dari pada pertumbuhan lapangan pekerjaan maka akan berdampak pada peningkatan angka pengangguran.

Pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia pembangunan ekonomi dilakukan dengan tujuan pemerataan pembangunan ekonomi di semua wilayah. Tujuan dilakukan pembangunan ekonomi sendiri adalah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Masalah pembangunan yang terjadi di Indonesia dan beberapa negara berkembang lainnya kurang lebih memiliki

permasalahan yang sama dimana jumlah penduduk yang tinggi tidak sebanding dengan peluang kerja yang ada sehingga tenaga kerja yang terserap rendah serta menyebabkan Tingkat pengangguran tinggi. Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan Pembangunan ekonomi suatu wilayah dengan cara menaikkan daya saing dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.(Saputri et al., 2019)

Indeks pembangunan manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun mutu hidup masyarakat. IPM dibangun oleh tiga dimensi dasar yaitu umur Panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup yang layak (Badan Pusat Statistik, 2020)



Sumber: (Open Data Jabar, 2023)

**Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Metropolitan Bandung Raya tahun 2022 (Persen)**

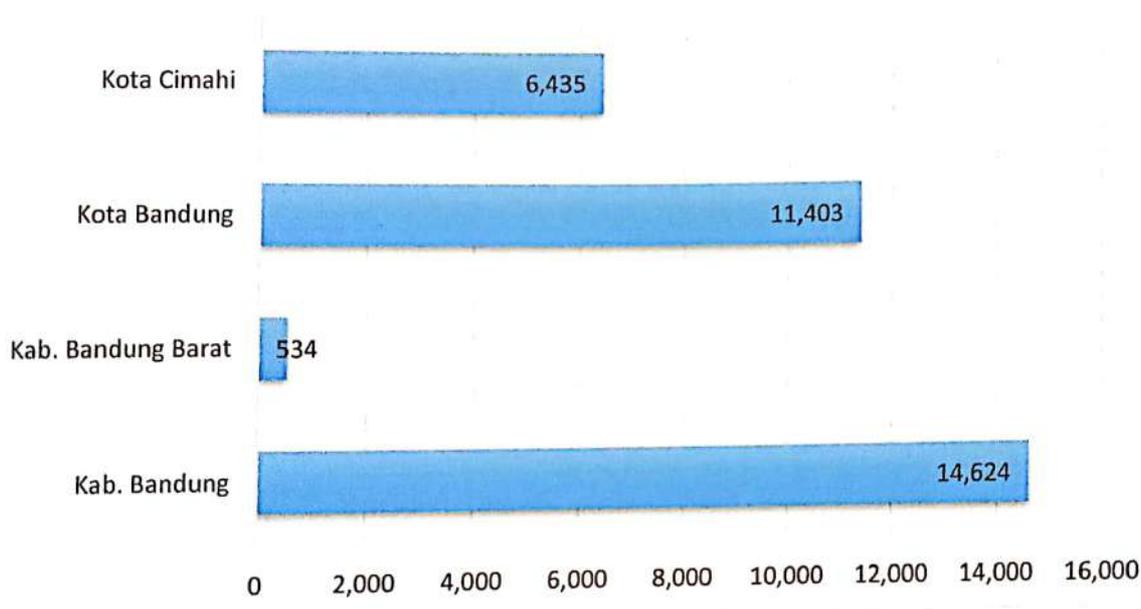
Berdasarkan gambar 1.3 diatas menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia wilayah Metropolitan Bandung Raya tahun 2022 belum merata setiap daerahnya. Seperti terlihat pada tabel 1.3 kabupaten/kota dengan IPM tertinggi pada

tahun 2022 yaitu di Kota Bandung dengan nilai IPM sebesar 82,5% per tahun, sedangkan IPM terendah ada di Kabupaten Bandung Barat dengan nilai yaitu sebesar 69,04% per tahun. Dengan tingginya nilai IPM artinya Kabupaten/Kota yang ada di Bandung Raya memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik, sehingga peluang mendapat pekerjaan lebih besar jika diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Namun yang terjadi pada Kabupaten/Kota wilayah Bandung Raya belum bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak karena minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia .

Proses pembangunan kerap kali dikaitkan dengan proses industrialisasi. Proses industrialisasi sendiri merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui peningkatan tingkat hidup dan kualitas hidup untuk menjadi lebih baik (Arsyad, 2004). Pembangunan industri harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Pembangunan industri tidak boleh hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga harus memperhatikan aspek lainnya. Industri dianggap sebagai sektor yang memiliki potensi untuk memimpin sektor-sektor lain dalam perekonomian, mendorong kemajuan secara keseluruhan (Dumairy, 1996).

Selain itu, industri juga memiliki peran yang cukup penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu produk-produk industri memiliki nilai dasar tukar yang cukup tinggi dan menguntungkan serta memberikan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan dengan produk dari sektor-sektor lain.

Jumlah unit usaha merupakan salah satu faktor penting dalam penyerapan tenaga kerja. Banyaknya jumlah unit usaha mempunyai peran yang sangat tinggi dalam penyerapan tenaga kerja, karena semakin banyak jumlah unit usaha yang terdapat dalam suatu daerah kemungkinan unit usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja dari daerah tersebut. Data jumlah industri kecil, menengah, dan besar dapat dilihat pada tabel berikut:



Sumber: (Open Data Jabar, 2022c)

#### **Gambar 1.4 Jumlah Industri Kecil Menengah dan Besar Wilayah Metropolitan Bandung Raya tahun 2022 (Unit)**

Pada gambar 1.4 diatas dapat dilihat jumlah unit industri kecil, menengah, dan besar di wilayah Bandung Raya yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi Pada tahun 2022. Jumlah Industri kecil, menengah, dan besar di wilayah Bandung Raya yang terbanyak ada di Kabupaten Bandung dengan jumlah industri sebanyak 14.624 unit, selanjutnya ada Kota Bandung dengan jumlah industri sebanyak 11.157 unit diikuti oleh Kota Cimahi dengan jumlah Industri sebanyak 6.435 unit, dan Kabupaten Bandung

Barat yang menjadi Wilayah di Bandung Raya yang mempunyai jumlah industri paling sedikit yaitu sebesar 534 pada tahun 2022. Pertumbuhan jumlah unit industri kecil menengah dan besar yang ada di Wilayah Bandung Raya terus meningkat dari tahun ke tahun, maka itu akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja yang kemungkinan akan terus meningkat selama lima tahun terakhir. Tingginya kontribusi sektor industri pada pertumbuhan ekonomi sangat memungkinkan untuk semakin terbukanya lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya.

Salah satu tujuan dari adanya pembangunan ekonomi melalui proses industrialisasi yaitu untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup untuk mengatasi pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat daripada peluang kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa salah satu isu utama yang terus dihadapi hingga saat ini dan belum berhasil diatasi adalah tingginya tingkat pengangguran yang masih berlangsung.

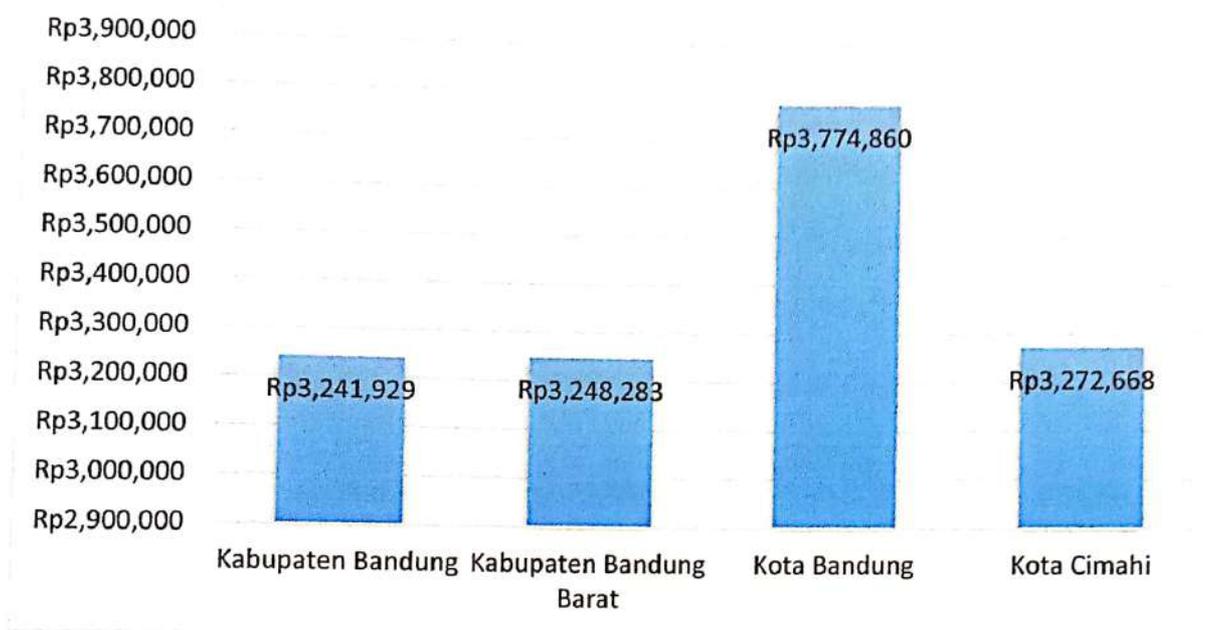
Indikator lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja yaitu tingkat upah. Meningkatnya tingkat upah akan memberikan dampak pada turunnya jumlah permintaan tenaga kerja. Kenaikan upah akan mengakibatkan penurunan kuantitas tenaga kerja yang diminta. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, berarti harga tenaga kerja relatif lebih mahal dari input lain. Sehingga pengusaha terdorong untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja yang relatif mahal dengan input lain yang harganya relatif lebih murah guna mempertahankan keuntungan yang maksimum.

Pada umumnya, setiap konsumen akan merespon cepat jika terjadi adanya kenaikan pada suatu barang seperti dengan mengurangi konsumsi barang tersebut atau bahkan sampai tidak lagi membeli barang tersebut dan mencari alternatif barang yang serupa dengan harga yang lebih terjangkau. Dampaknya akan mempengaruhi banyak barang yang telah diproduksi menjadi tidak laku di pasar, dan produsen harus mengurangi jumlah produksinya. Dengan demikian berkurangnya target produksi berdampak pada penjualan dan menyebabkan turunya tenaga kerja yang dipergunakan.

Tingkat upah merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam masalah ketenagakerjaan. Hal ini karena keinginan orang bekerja adalah untuk mendapatkan upah yang layak guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Bila tingkat upah yang ditawarkan pengusaha dinilai tidak mencukupi oleh pekerja, maka pekerja tersebut tidak akan menerima pekerjaan yang ditawarkan. Sebaliknya, ada juga yang bekerja dengan tingkat upah berapapun. Upah adalah balas jasa untuk faktor produksi tenaga kerja. Hal ini karena pemenuhan kebutuhan yang layak setiap kota berbeda-beda, maka disebut upah minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi pada dasarnya merupakan imbalan atau balas jasa dari para produsen kepada tenaga kerja atas prestasinya yang telah disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah tenaga kerja yang diberikan tergantung pada biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya, peraturan perundang-undangan yang mengikat tentang upah minimum regional (UMR), produktivitas marginal tenaga kerja, tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat buruh dan

serikat pengusaha, dan perbedaan tenaga kerja. Berikut ini data upah minimum kabupaten/kota di Bandung Raya:



Sumber:(Open Data Jabar, 2022a)

### **Gambar 1.5 Upah Minimum Kabupaten/Kota Wilayah Metropolitan Bandung Raya tahun 2022 (Rupiah)**

Berdasarkan gambar 1.5 diatas dapat diketahui bahwa upah minimum regional dari tahun 2022 wilayah Metropolitan Bandung Raya memiliki perbedaan upah pada setiap wilayahnya. Dengan nilai tertinggi ada di Kota Bandung sebesar Rp.3.774.860, mengingat Kota Bandung adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat, dan mempunyai infrastruktur serta kawasan industri besar yang padat modal. Selanjutnya untuk upah daerah tertinggi kedua ada di Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp. 3.248.283 selanjutnya ada Kabupaten Bandung dengan upah sebesar Rp.3.241.929. Adapun upah terendah terdapat di Kota Cimahi dengan upah sebesar Rp. 3.272.668, Kota Cimahi memiliki upah yang kecil mengingat daerah tersebut merupakan wilayah terkecil dari tiga wilayah lainnya.

Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terserap diduga dipengaruhi oleh banyaknya lapangan kerja atau unit usaha dan juga semakin tinggi nilai indeks pembangunan manusia. Sebaliknya, berkurangnya jumlah penyerapan tenaga kerja diduga dipengaruhi oleh naiknya upah minimum yang disebabkan oleh naiknya harga bahan baku untuk produksi dan akan menyebabkan pengurangan tenaga kerja.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Determinan Penyerapan Tenaga Kerja Wilayah Metropolitan Bandung Raya 2017-2022”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka identifikasi masalah penelitian di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah unit usaha, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum kabupaten/kota secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja Wilayah Metropolitan Bandung Raya tahun 2017-2022?
2. Bagaimana pengaruh jumlah unit usaha, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum kabupaten/kota secara bersama-sama (simultan) terhadap penyerapan tenaga kerja Wilayah Metropolitan Bandung Raya tahun 2017-2022?

## **1.3 Tujuan penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah unit usaha, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum kabupaten/kota secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja di wilayah Metropolitan Bandung Raya tahun 2017-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah unit usaha, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum kabupaten/kota secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja di wilayah Metropolitan Bandung Raya tahun 2017-2022.

#### **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Bagi penulis**

Memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelaraskan ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan, dan untuk melengkapi salah satu syarat akademik dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu ekonomi pada Universitas Siliwangi Tasikmalaya.

##### **1.4.2 Kegunaan Bagi pemerintah**

Dapat menjadi bahan referensi untuk pengambilan keputusan dalam menentukan kebijakan dalam rangka mengatasi permasalahan ketenagakerjaan khususnya di Wilayah Metropolitan Bandung Raya.

##### **1.4.3 Kegunaan Bagi pihak lain**

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dan juga dapat sebagai bacaan yang bermanfaat bagi yang membutuhkan.

## **1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah wilayah Metropolitan Bandung Raya yang meliputi empat Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Badung, dan Kota Cimahi.

Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui *website* resmi dari *open* Data Jabar.

### **1.5.2 Jadwal penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan dimulai dari pengajuan judul kepada Program Studi Ekonomi Pembangunan, dilanjutkan dengan pengajuan dan penyerahan SK bimbingan, yang kemudian dilanjutkan dengan konsultasi dan proses kegiatan bimbingan. Adapun jadwal penelitian ini seperti tercantum pada:

**Tabel 1. 1 Jadwal Penelitian**

Keterangan	2023-2024																												
	Okt			Nov			Des-Feb						Mar			Apr			Mei			Juni							
Pengajuan SK	■																												
Penyerahan SK			■																										
Pengumpulan Data				■																									
Penyusunan UP							■																						
Seminar UP														■															
Pengolahan Data															■														
Penyusunan Skripsi																				■									
Sidang Skripsi																											■		
Revisi Skripsi																											■		